SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2020

TUPOKSI BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2020

- ✓ Peraturan Daerah Kab. Lamongan No.5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- ✓ Peraturan Bupati Lamongan No.63 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup No.54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab. Lamongan

TUGAS

- Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

FUNGSI

- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten administrasi umum yang berkaitan dengan tugasnya.

VISI DAN MISI

VISI

"Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing"

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

MISI

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
2. Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah
3. Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar dengan menjaga Kelestarian Lingkungan
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik ***(Misi Bagian Perencanaan dan Keuangan)***
5. Memantapkan Kehidupan Masyarakat yang Tentram dan Damai dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal

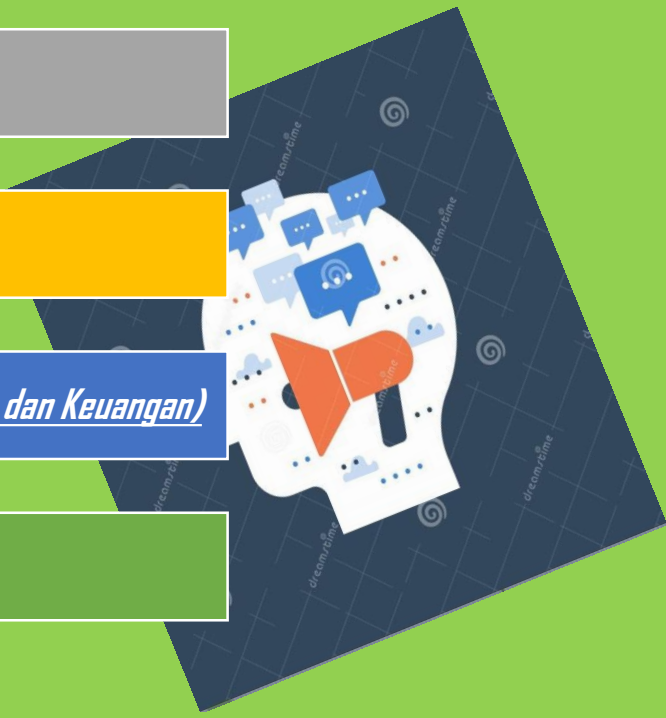

Keselarasan RPJMD dan RENSTRA

RPJMD

VISI Kab.Lamongan: "Terwujudnya Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing"

MISI 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

TUJUAN : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan PubliK
SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

R E N S T R A

TUJUAN : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik

Indikator Tujuan : Nilai LPPD; Nilai SAKIP; IKM

SASARAN : Terwujudnya kebijakan strategis bidang administrasi umum
Indikator sasaran : Prosentase kebijakan strategis bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti

MATRIK RENSTRA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik

Sasaran 2 : Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum

No	Indikator Sasaran/Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	$\frac{\text{Jml Bagian di Setda Yg Penatausahaan Keuangan dan asetnya Telah benar dan tertib}}{\text{Jumlah Bagian di Setda}} \times 100\ \%$	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Asisten Administrasi Umum

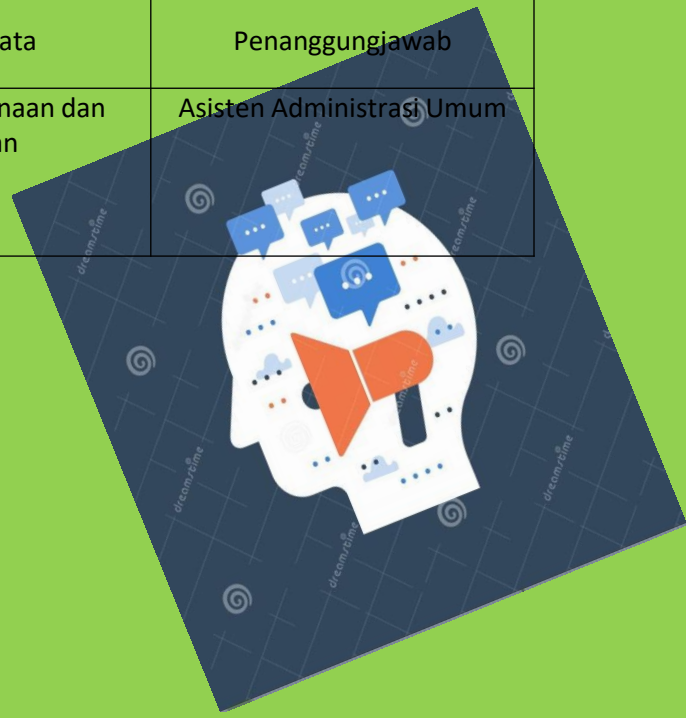

Capaian Kinerja Tahun 2019

SASARAN

Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum

Sasaran

Indikator

INDIKATOR

Prosentase Penatausahaan Keuangan dan Aset Setda Yang Baik dan Akuntabel .

Formula Indikator

Jumlah Bagian di Setda Yang Telah Baik dan Akuntabel Peatausahaan Keuangan dan Asetnya/Jumlah Bagian di Setda x 100%.

Formula Indikator

Tahun Capaian

BASELINE TH. 2017	TAHUN 2018
100 %	100 %

Target, Realisasi, Capaian Kinerja

Target Tahun 2019 = 100%

Realisasi Capaian Kinerja = 12/12*100% = 100%.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Perencanaan dan Keuangan

DASAR HUKUM

SK Kepala Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan No:700/11/413.033/2020 tentang Penetapan IKU

Prosentase SKPD yang telah tertib dalam pengadministrasian dan Penatausahaan Keuangan dan Barang milik Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Perencanaan dan Keuangan

Integrasi Perencanaan Kinerja PD

Intergrasi Perencanaan Kinerja PD

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayan Publik	Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Pemerintahan Umum	Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum Yang Ditindaklanjuti	100%	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Prosentase Aparatur yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti bimtek
					Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perencanaan dan Keuangan,	Prosentase Bagian yang telah tertib dalam penyusunan perencanaan daerah, pengadministrasian penatausahaan keuangan dan pelaporan	Fasilitasi Peningkatan P Pengelolaan Keuangan Lingkup Setda	• Jumlah Bagian di Setda yang tertib penatausahaan dan pengelolaan keuangannya • Jumlah aparatur lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti bimtek terkait pengelolaan keuangan • Jumlah aparatur lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pembinaan terkait penyusunan pertanggungjawaban lingkup Setda
							Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala	• Jumlah Laporan Yang Disusun

Integrasi Perencanaan Kinerja PD

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
							Fasilitasi Penyusunan Dokumen Evaluasi	• Jumlah Aparatur Yang Meningkat Kemampuannya Setelah Mengikuti Bimtek Terkait Peningkatan Sumber Daya Aparatur • Jumlah Laporan Yang Disusun • Jumlah Bagian Lingkup Setda Yang Tertib dan Benar Dalam Menyusun Dokumen Evaluasi
							Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	• Jumlah Bagian Yang Tertib dan Benar Dalam Menyusun Perencanaan • Jumlah Dokumen Yang Disusun • Jumlah Aparatur Yang Meningkat Kemampuannya Setelah Mengikuti Bimtek Terkait Perencanaan

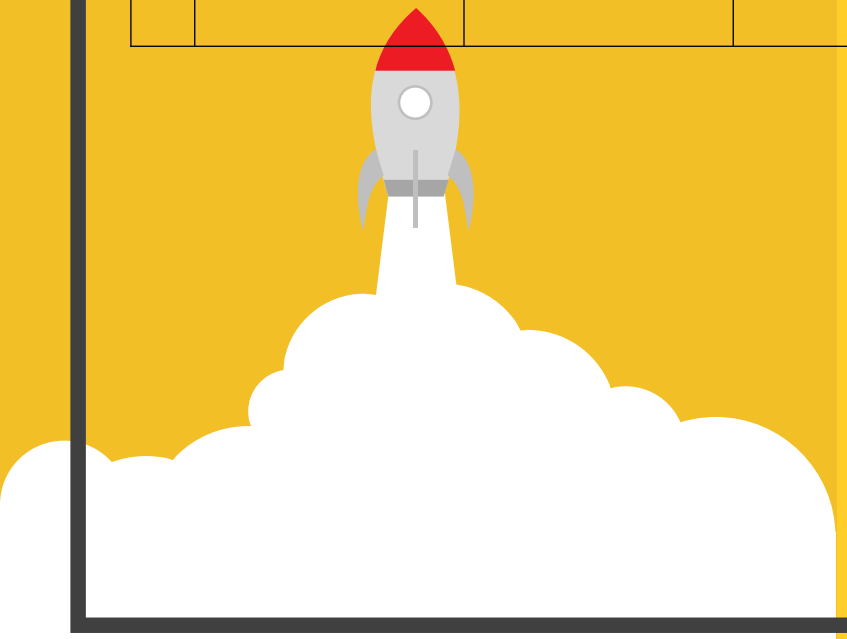

Cascading

Bagian Perencanaan dan Keuangan 2020

Sekretaris Daerah

Tujuan :
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Indikator :
Nilai LPPD
Nilai SAKIP
IKM

Ass. Adm. Umum Eselon II

Sasaran :
Terwujudnya kebijakan strategis bidang administrasi umum

Indikator :
Persentase kebijakan strategis bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti

KABAG Eselon III

Sasaran :
Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Indikator :
Prosentase Penatausahaan Keuangan dan Aset Setda Yang Baik dan Akuntabel .

Kasubbag Eselon IV

Kasubbag Keuangan

asaran :
Terwujudnya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi kebijakan Daerah di Bidang Keuangan di lingkup Sekretariat Daerah

Indikator :
- Prosentase Laporan Keuangan Lingkup Setda yang sesuai dengan ketentuan
- Prosentase Dokumen Pencairan Dana yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan
- Prosentase Temuan yang dihimpun dan telah ditindak lanjuti di lingkup Sekretariat Daerah

Kasubbag Perencanaan

Sasaran :
Terwujudnya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan di lingkup Sekretariat Daerah

Indikator :
- Prosentase Aparatur yang meningkat pengetahuanya setelah mengikuti Bimtek Yang Berkaitan Dengan Perencanaan Daerah
- Prosentase Dokumen Renja, RKA dan DPA di lingkup Sekretariat Dearah yang dihimpun dan disusun sesuai dengan ketentuan
- Prosentase Dokumen Perjajian Kinerja di lingkup Sekretariat Daerah yang di himpun dan di susun sesuai dengan ketentuan

Kasubbag Pelaporan

Sasaran :
Terwujudnya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi kebijakan Daerah di Bidang Pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah

Indikator :
- Prosentase Laporan Keuangan lingkupan Setda yang sesuai dengan ketentuan
- Prosentase Dokumen Evaluasi di lingkup Setda yang dihimpun dan disusun sesuai dengan ketentuan

SKEMA PETA PROSES BISNIS

Supplier

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Input

ANGGARAN

MANAJEMEN PROSES

PENGELOLAAN KINERJA	KEPATUHAN INTERNAL	PEMETAAN RESIKO

MAIN PROSES

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Lingkup Setda

OUTCOME

- Laporan Keuangan Lingkup Setda yang sesuai dengan ketentuan
- Dokumen RKA dan DPA lingkup Sekretariat Daerah yang dihimpun
- Dokumen Pencairan Dana yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan
- Temuan yang telah ditindaklanjuti dan dihimpun di lingkup Sekretariat Daerah
- Dokumen Perencanaan Yang disusun dengan tertib dan sesuai ketentuan
- Dokumen Evaluasi di lingkup Setda yang dihimpun dan disusun sesuai dengan ketentuan
- Laporan Keuangan lingkup Setda yang sesuai dengan ketentuan

CUSTOMER

- OPD
- BPK
- INSPEKTORAT

PROSES BISNIS INTI

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Terwujudnya Administrasi Umum Yang Berkualitas dan Sesuai Dengan Ketentuan — Level 0

Perumusan Kebijakan Strategis yang ditindaklanjuti dalam Penyelenggaraan Tertib Administrasi Umum — Level 1 Eselon 2

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Lingkup Setda — Level 2 Eselon 3

Level 3 Eselon 4

Keuangan

Verifikasi Keuangan

- Verifikasi Cash Budget DPA Setda
- Verifikasi Dokumen Pencairan Dana Sekretariat Daerah
- Verifikasi SPJ Fungsional Setda

Tindak Lanjut Hasil

- Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (Inspektorat dan BPK)

Perencanaan

Perencanaan

- Penyusunan RKA Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Penyusunan DPA Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Menghimpun RKA dan DPA Setda
- Menyusun Renja Bagian Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun Renja Setda
- Menyusun dan Menghimpun Perjanjian Kinerja Lingkup Setda

Pelaporan

Pelaporan Keuangan

- CALK Setda (Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun)

Dokumen Evaluasi

- Menyusun SPIP Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Menyusun SAKIP Bagian Perencanaan dan Keuangan

LOGIC MODEL

Mewujudkan Kebijakan Bidang Administrasi Umum.

Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas Dengan Didukung Birokrasi Yang Efektif dan Efisien Serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik	Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	• Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Lingkup Setda	• Verifikasi Cash Budget DPA Setda • Verifikasi Dokumen Pencairan Dana Sekretariat Daerah • Verifikasi SPJ Fungsional Setda • Menghimpun Hasil temuan BPK
				• Pendidikan dan Pelatihan Formal	• Mengikuti Bimtek Peningkatan Kaspasitas Sumber Daya Aparatur
				• Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	• Penyusunan RKA Bagian Perencanaan dan Keuangan • Penyusunan DPA Bagian Perencanaan dan Keuangan • Menghimpun RKA dan DPA Setda • Menyusun Renja Bagian Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun Renja Setda • Penyusunan Perjanjian Kinerja
				• Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala	• CALK Setda (Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun)
				• Fasilitasi Penyusunan Dokumen Evaluasi	• Menyusun SPIP Bagian Perencanaan dan Keuangan • Menyusun SAKIP Bagian Perencanaan dan Keuangan

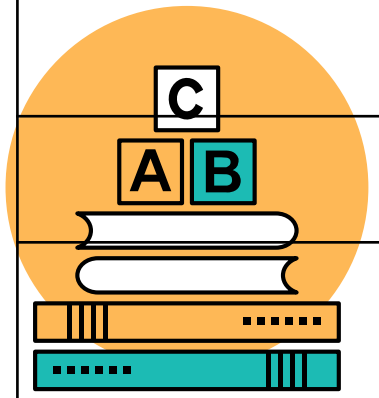

Manajemen Resiko

PERUMUSAN STRUKTUR ANALISA RESIKO

Pemerintah Kabupaten Lamongan
Perangkat Daerah : Bagian Perencanaan dan Keuangan
Nama Kegiatan : Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda

NO	PERNYATAAN RESIKO	SUMBER	DAMPAK	
			URAIAN	PHAK YANG TERKENA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bukti pendukung pengajuan SPP yang kurang sempurna/lengkap	Dokumen pengajuan SPP	Penundaan Pengajuan SPP	Bagian yang melakukan pengajuan

PERUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RESIKO

Pemerintah Kabupaten Lamongan
Perangkat Daerah : Bagian Keuangan dan Aset
Nama Kegiatan : Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda

SKALA DAMPAK

NO	PERNYATAAN RESIKO	KATEGORI	INDIKATOR	TINGKAT DAMPAK				
				SANGAT KECIL	KECIL	SEDANG	BESAR	SANGAT BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bukti pendukung pengajuan SPP yang kurang sempurna/lengkap	KEUANGAN	Prosentase pengajuan SPP yang belum tertib dan belum sesuai dengan ketentuan		**2**			

Konsistensi Dokumen SAKIP

Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik
Sasaran 3 : Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum

No	Indikator Sasaran/Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum Yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml. Kebijakan Strategis Bid. Adminitrsi Umum Yg Ditiundaklanjuti}}{\text{Jumlah Kebijakan Strategis Yang Diusulkan}} \times 100\ \%$	Bagian Keuangan dan Aset	Asisten Administrasi Umum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TB 1	TB 2	TB 3	TB 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya kebijakan strategis bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan	1 Prosentase Bagian yang telah tertib dalam penyusunan perencanaan daerah dan pengadministrasian serta penatausahaan keuangan	25%	-	-	-

PROGRAM		ANGGARAN	KET.
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	37.700.000,-	APBD
2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perencanaan dan Keuangan	Rp.	1.131.400.000,-	APBD

Lamongan, Januari 2020

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

DR. YUHRONUR EFENDI, MBA.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680112 198603 1 001

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SETDA KABUPATEN LAMONGAN

Drs. SYAHID, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650417 199311 1 002

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NO DPA OPD						FORMULIR DPA-OPD 2.2.1
	5.01	5.01.01	28	001	5	2	

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintah	:	5.01 - Urusan Sekretariat Daerah
Organisasi	:	5.01.01 - Sekretariat Daerah
Program	:	5.01.01.28 - Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perencanaan Dan Keuangan
Kegiatan	:	5.01.01.28.001 - Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Lingkup Setda
Lokasi	:	Sekretariat Daerah
Sumber Dana	:	Dana Daerah

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Bagian yang telah tertib dalam penyusunan perencanaan daerah dan pengadministrasian serta penatausahaan keuangan	100%
Masukan	Jumlah Dana Yang Tersedia	Rp. 360.000.000
Keluaran	Jumlah Bagian di Setda yang tertib penatausahaan dan pengelolaan keuangannya Jumlah aparatur lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti bimtek terkait pengelolaan keuangan Jumlah aparatur lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pembinaan terkait penyusunan pertanggungjawaban lingkup Setda	12 Bagian 5 Orang 24 Orang
Hasil	Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum Yang Ditindaklanjuti	100%

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Organisasi Perangkat Daerah

Kode	Uraian	Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga	Jumlah

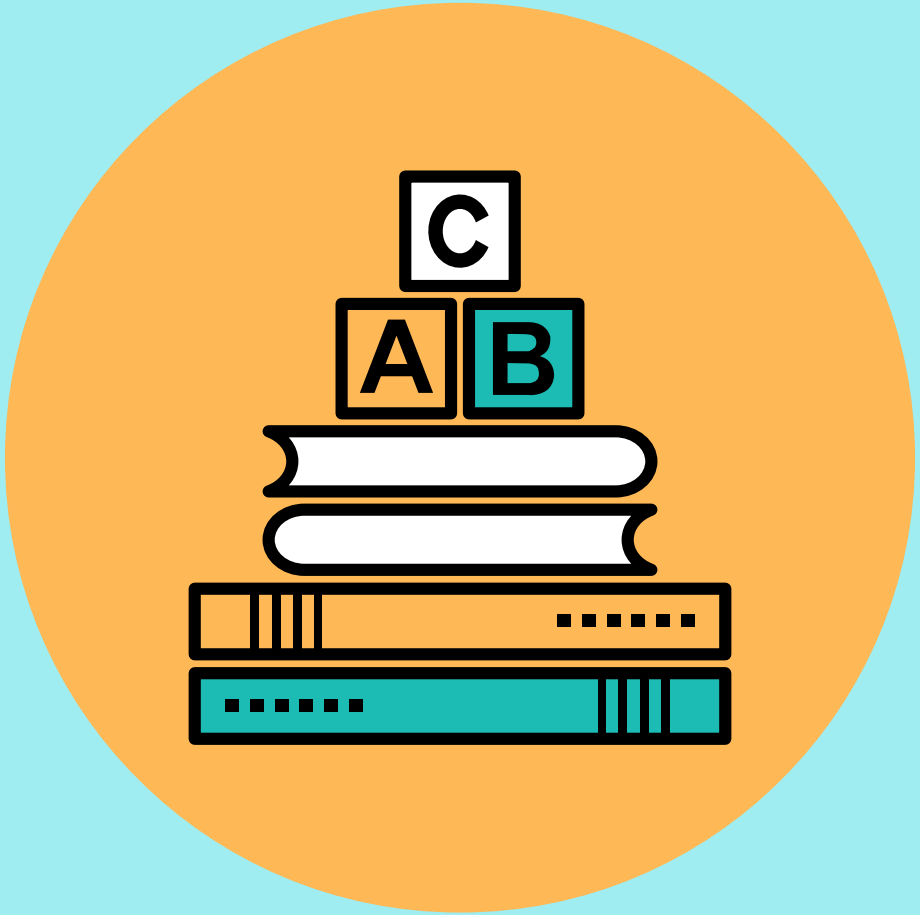

Thank you

This text can be replaced with your own text